



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦏꦽꦠ

ꦗꦲꦏꦸꦫꦏꦺꦴꦗꦏꦽꦠꦏꦺꦴꦗꦏꦽꦠ
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Nomor : 896/1227
Sifat : biasa
Lampiran : 1 file
Hal : Permohonan Narasumber

Kepada
Yth. 1. Ka. DP3AP2 DIY
2. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta
3. Siti Sumaryatiningsih, S.Si, M.
IP (STPMD "APMD")

di

Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, bersama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan kegiatan Musrenbang Perempuan pada :

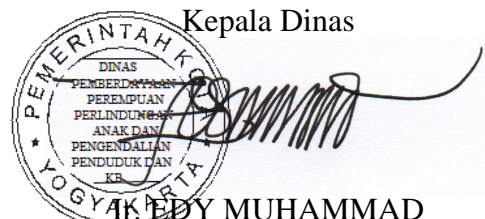
Hari, tanggal : Jum'at, 17 Maret 2022

Jam : 09.00 WIB - 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Kunti Lantai 2 Gedung PKK Komplek Balaikota Yogyakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bapak/ibu berkenan menjadi narasumber pada acara dimaksud dan mohon untuk mengirimkan No. NPWP, KTP, No. Rekening serta surat tugas paling lambat Kamis, 16 Maret 2023

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih



Kepala Dinas

IK EDY MUHAMMAD
NIP. 196309161992031006





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DIPLOMA TIGA
Status Terakreditasi B (SK BAN PT. No. 3986/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019)

Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 550775, 561971 Fax. (0274) 515989 e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

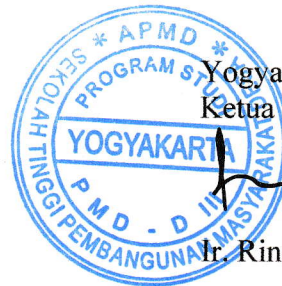
Nomor: 56-A/PMD DIII/III/2023

Ketua Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma Tiga STPMD "APMD"
Yogyakarta, memberikan tugas kepada :

Nama : Siti Sumaryatiningsih, S.Si, M.I.P
NIDN : 0510048002
Pekerjaan : Dosen STPMD"APMD" Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota, pada tanggal 17 Maret 2023 di Ruang Rapat Kunti Lantai 2 Gedung PKK Komplek Balaikota Yogyakarta.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 14 Maret 2023

Ketua


Ir. Rini Dorojati, M.S



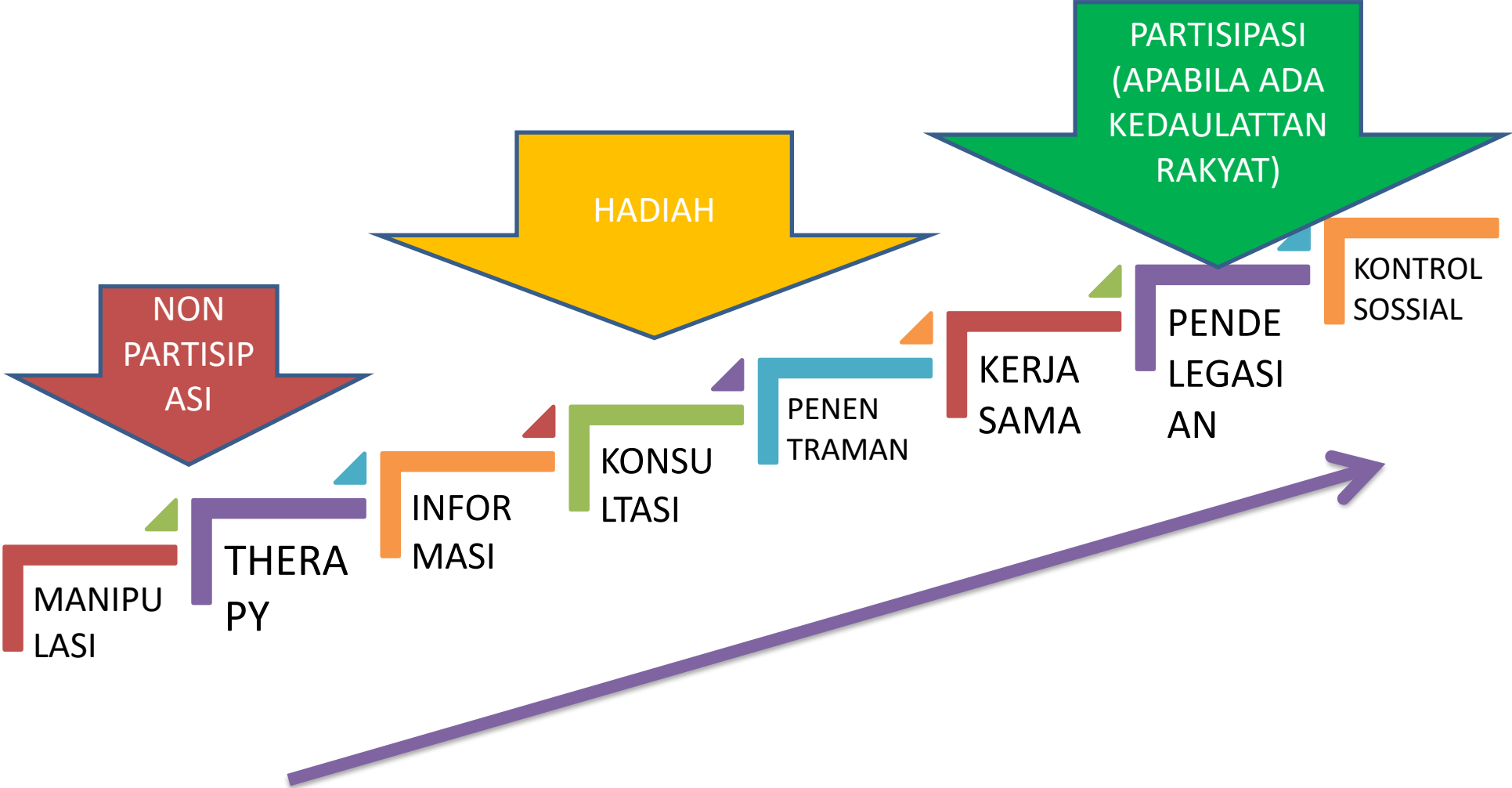
**SUARA dan AKSI PEREMPUAN
Untuk PEMBANGUNAN**



Siti Sumaryatiningsih
siti.sumaryatiningsih@gmail.com
081328444950
Prodi PMD, STPMD "APMD"
Caksana Institute

TINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN

(ARNSTEIN, 1969)



Tingkatan Partisipasi	
Manipulasi	Partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.
Terapi	Digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit masyarakat akibat adanya kesenjangan kekuasaan dll. Berbagai program bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang menderita ketidakberdayaan (sense of powerless), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
Pemberian Informasi	Tingkatan ini merupakan transisi antara non participation dengan tokenism - simbol. Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat, Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah, berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan, tanpa adanya umpan balik (feedback) dari masyarakat. Media massa, poster, pamflet dan tanggapan atas pertanyaan, merupakan alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah.
Konsultasi	Pada tingkatan ini pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Tingkat ini merupakan tingkat yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (artificial) karena tidak dijadikannya ide-ide dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Bentuk konsultasi masyarakat adalah survei tentang pola pikir masyarakat, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat publik. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu.

Tingkatan Partisipasi	
Perwakilan Placation	<p>Sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah, ini terbukti sudah adanya keterlibatan masyarakat yang ikut menjadi anggota komite (badan kerjasama) yang terdiri dari wakil-wakil dari instansi pemerintah.</p> <p>Pemerintah membiarkan masyarakat untuk memberikan saran atau usul, tetapi keputusan masih dipegang oleh elit kekuasaan. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat pada anggota komite masih terlalu sedikit dibandingkan dengan anggota instansi pemerintah.</p>
Kemitraan	<p>Masyarakat memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan.</p> <p>Pemerintah membagi tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan kerjasama. Setelah ada kesepakatan tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.</p>
Pelimpahan Kekuasaan	<p>Masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan permasalahan yang ada, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dibandingkan dengan memberi tekanan kepada masyarakat.</p>
Pengawasan masyarakat	<p>Tingkat partisipasi tertinggi dimana masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.</p> <p>Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga</p>

Prinsip Partisipasi

Cakupan

- Semua Orang atau wakil kelompok terdampak dari hasil keputusan

Kesetaraan dan Kemitraan

- Sertiap orang punya hak, keterampilan, kemampuan dan prakarsa dalam proses pembangunan

Transparansi

- Iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif, membuka ruang dialog

Kesetaraan tanggung jawab

- Semua mempunyai tanggung jawab sesuai dengan porsinya

Pemberdayaan

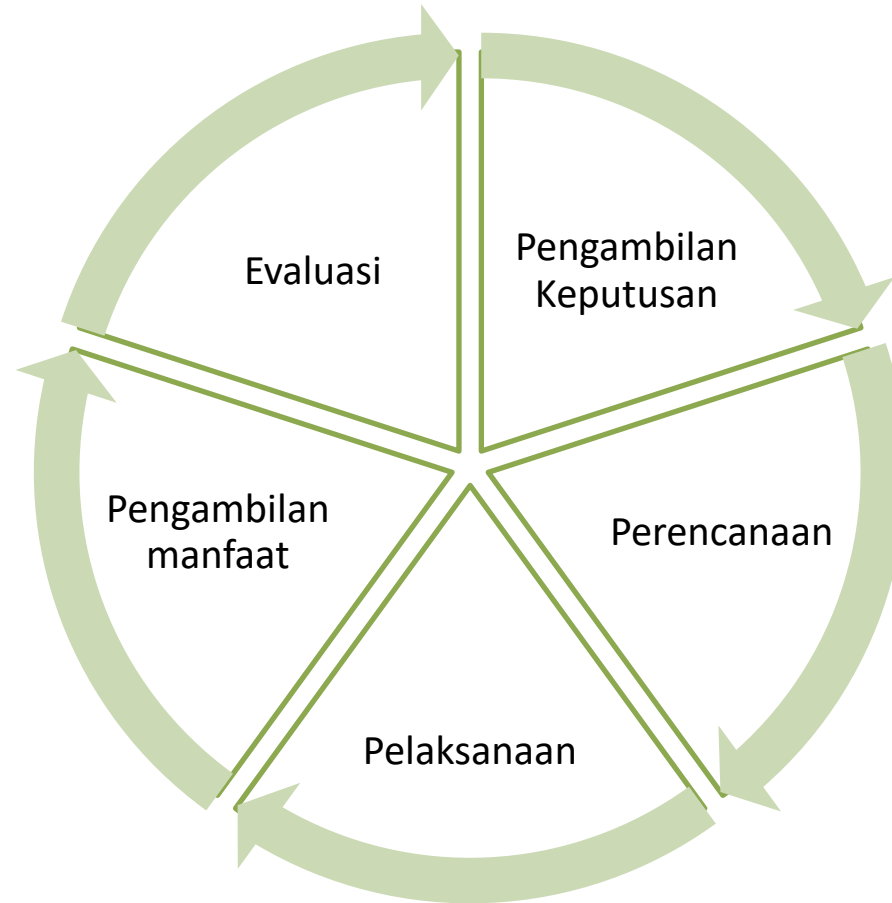
- Pemberdayaan mensyaratkan kemandirian bukan ketergantungan

Kerjasama

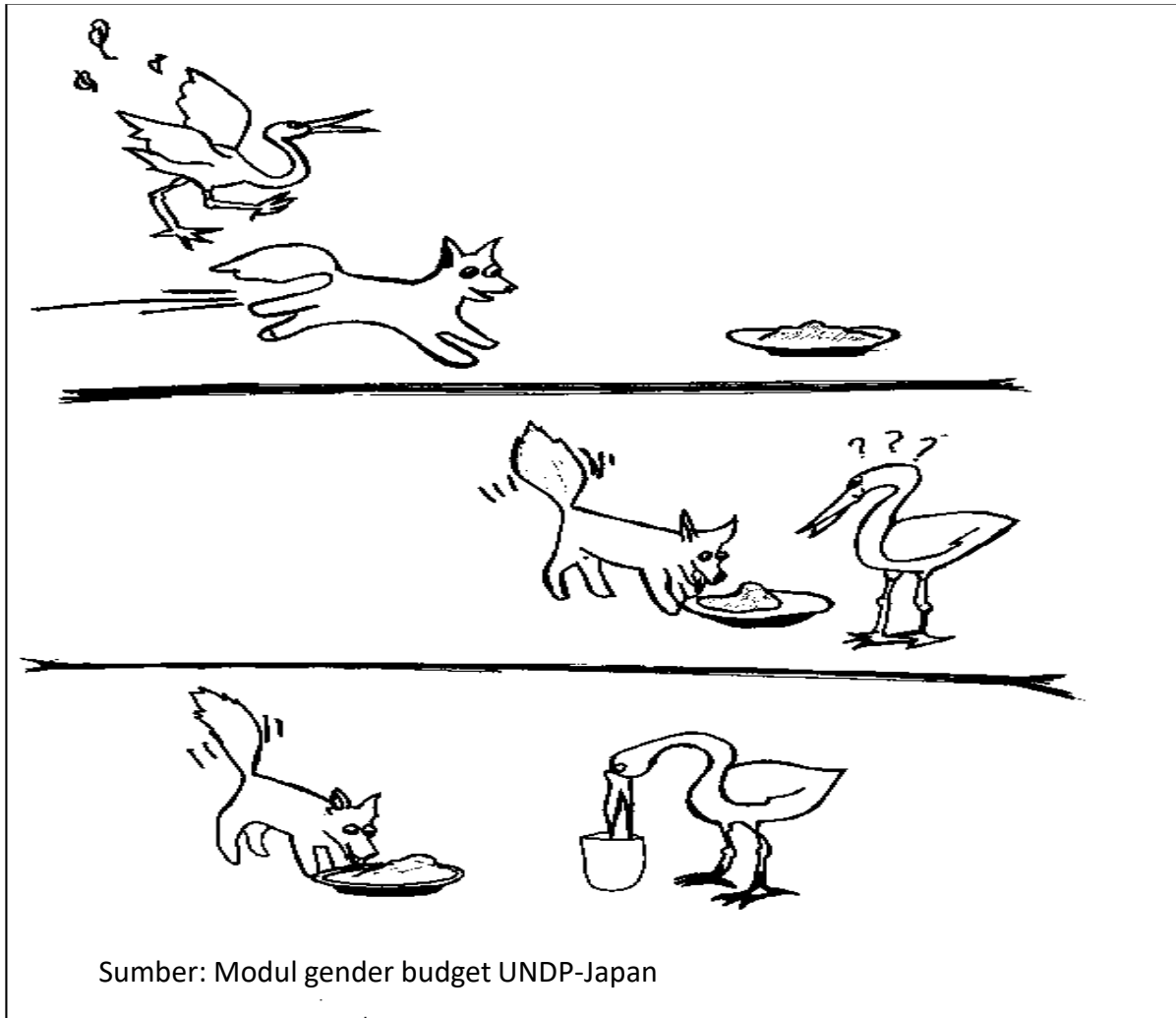
- Multistakeholder bekerjasama dalam mengatasi berbagai persoalan dalam pembangunan

Jenis Partisipasi Masyarakat

(Dwiningrum, 2011 dan Slamet 1993)



Mengapa akses antara laki-laki dan perempuan penting diperhatikan?



Sumber: Modul gender budget UNDP-Japan

- Perhatikan gambar sebelah !

-Apa makna gambar itu?

- apa yang terjadi apabila diperlakukan sama?

Musrenbang perempuan
adalah Langkah afirmasi/ langkah khusus
yang bersifat sementara



RUANG PARTISIPASI PEREMPUAN



SIAP

Suara dan Aksi Perempuan Pelopor



Foto Dokumentasi di upload di link: bit.ly/3Eg8SdU

APA PROGRAM YANG SUDAH ADA DAN DIPERLUKAN AGAR PEREMPUAN SIAP :



**SUARA PEREMPUAN
UNTUK PERUBAHAN**



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DIPLOMA TIGA
Status Terakreditasi B (SK BAN PT. No. 3986/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019)

Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 550775, 561971 Fax. (0274) 515989 e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

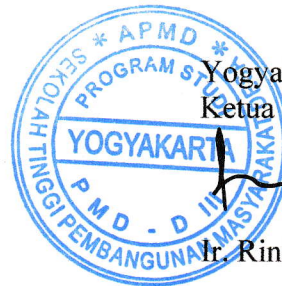
Nomor: 56-A/PMD DIII/III/2023

Ketua Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma Tiga STPMD "APMD"
Yogyakarta, memberikan tugas kepada :

Nama : Siti Sumaryatiningsih, S.Si, M.I.P
NIDN : 0510048002
Pekerjaan : Dosen STPMD"APMD" Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota, pada tanggal 17 Maret 2023 di Ruang Rapat Kunti Lantai 2 Gedung PKK Komplek Balaikota Yogyakarta.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 14 Maret 2023

Ketua


Ir. Rini Dorjati, M.S



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

SERTIFIKAT

No : 896/019/DP3AP2KB/VII/2023

Diberikan kepada :

Siti Sumaryatiningsih, S.Si.,M.I.P

Sebagai :

Narasumber

Pada Kegiatan Musrenbang Tematik Perempuan
yang diselenggarakan pada Jumat, 17 Maret 2023
bertempat di Ruang Kunthi, Komplek Balaikota, Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Kepala Dinas



Gir. Eddy Muhammad

NIP 196309161992031006